



Evaluasi Program Penanggulangan Stunting di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

Nur Astifa^{1*}, Nursamsir², Yudi Agusman³

^{1,2,3} Universitas Sembilanbelas November Kolaka,

Email: nurastifa4@gmail.com*

Abstrak

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif anak, dan Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi di kecamatan tersebut, yaitu 27,86% dari 61 balita yang diukur, jauh di atas rata-rata kecamatan sebesar 9,29%. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Desa Lamedai menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi unsur Puskesmas, pemerintah desa, kader posyandu, dan masyarakat, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik pada keenam indikator, ditandai dengan tersedianya tenaga dan sarana kesehatan yang memadai, alokasi Dana Desa yang terarah pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta penetapan Desa Lamedai sebagai lokus prioritas berdasarkan data prevalensi riil. Namun demikian, capaian belum sepenuhnya optimal karena hambatan yang muncul secara konsisten bersumber dari rendahnya kesadaran dan konsistensi partisipasi sebagian orang tua balita dalam kegiatan posyandu, bukan dari sisi penyediaan program oleh pemerintah desa dan Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi gizi serta perluasan intervensi di luar Pemberian Makanan Tambahan, seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, dan Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), guna mengoptimalkan penurunan prevalensi stunting di masa mendatang.

Kata kunci: Desa Lamedai, Evaluasi Kebijakan, Posyandu, Stunting

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem that affects children's physical growth and cognitive development, and Lamedai Village, Tanggetada District, Kolaka Regency records the highest stunting prevalence in the district at 27.86% of 61 toddlers measured, far above the district average of 9.29%. This study aims to evaluate the implementation of the Stunting Mitigation Program in Lamedai Village using William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study uses a qualitative descriptive approach with informants selected purposively, comprising representatives of the Public Health Center, village government,

posyandu cadres, and the community, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the program has generally run well across the six indicators, supported by adequate health personnel and facilities, targeted Village Fund allocation for Supplementary Feeding (PMT), and the designation of Lamedai Village as a priority location based on real prevalence data. However, outcomes are not yet fully optimal because the persistent obstacle lies in the low awareness and inconsistent participation of some parents of toddlers in posyandu activities, rather than in the program provision by the village government and the Public Health Center. The study recommends strengthening nutrition education and expanding interventions beyond Supplementary Feeding, such as Clean and Healthy Living Behavior (PHBS), exclusive breastfeeding, complementary feeding, and the Healthy Kitchen to Overcome Stunting (DASHAT) Program, to further optimize the reduction of stunting prevalence in the future.

Keywords: *Evaluation, Lamedai Village, Policy, Posyandu, Stunting*

Pendahuluan

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya, yang umumnya disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, infeksi berulang, serta rendahnya kualitas lingkungan dan pelayanan kesehatan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa (Kemenkes RI, 2022). Berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan stunting di tingkat lokal masih menghadapi kendala, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, hingga koordinasi lintas sektor yang belum optimal (Arifin, 2022; Shauma & Purbaningrum, 2022)

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu wilayah prioritas percepatan penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (BPK RI, 2021). Di Kecamatan Tanggetada, data Puskesmas Tanggetada menunjukkan bahwa Desa Lamedai memiliki persentase stunting tertinggi, yaitu 27,86% dari 61 balita yang diukur, jauh di atas rata-rata kecamatan sebesar 9,29%, sehingga desa ini ditetapkan sebagai lokus prioritas penanganan stunting. Pemerintah desa bersama Puskesmas telah melaksanakan berbagai program seperti pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang balita, dan sosialisasi gizi seimbang, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi

hambatan, terutama pada rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian orang tua balita.

Untuk menilai sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagaimana dikutip dalam Arafat (2026) yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator ini dipilih karena mampu menilai keberhasilan suatu kebijakan secara menyeluruh, baik dari sisi pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, pemenuhan kebutuhan, distribusi manfaat, maupun kesesuaian sasaran Arafat (2023) Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hasil pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka, dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut guna memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas program penanggulangan stunting di masa yang akan datang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena pelaksanaan program secara mendalam dari perspektif pihak-pihak yang terlibat langsung (Pettalongi et al., 2025) Penelitian dilaksanakan di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki angka stunting tertinggi di kecamatan tersebut sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Fokus penelitian dirinci berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam Arafat (2026), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Harahap et al., 2024), terdiri dari Kepala Tata Usaha Puskesmas Tanggetada, Kepala Desa Lamedai, kader posyandu, serta perwakilan masyarakat yang memiliki maupun tidak memiliki balita dengan kasus stunting. Data yang digunakan terdiri atas data primer, yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, dan data sekunder yang bersumber dari dokumen serta literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Harahap et al., 2024)

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015), yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui kriteria credibility,

transferability, dependability, dan confirmability, guna memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Harahap et al., 2024)

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dianalisis menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam Arafat (2026) sebagaimana diuraikan berikut.

1. Efektivitas

Penurunan angka stunting di Desa Lamedai didukung oleh intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan secara rutin, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemantauan tumbuh kembang balita, sehingga balita yang terdeteksi stunting mendapatkan penanganan berkelanjutan. Konvergensi program lintas sektor antara Puskesmas, kecamatan, dan pemerintah desa turut mempercepat deteksi dini kasus baru. Kepala Tata Usaha Puskesmas Tanggetada menyampaikan hal berikut.

“...pada tahun 2024 ada beberapa lokus di Kecamatan Tanggetada termasuk Desa Lamedai, Desa Lalonggosua, dan Anaiwoi, tapi yang menjadi itu hanya Desa Lamedai karena angka stunting bisa dikatakan tinggi...disebabkan karena faktor kurangnya keterlibatan masyarakat...”
(Kepala Tata Usaha Puskesmas, wawancara 2026)

Sejalan dengan konsep efektivitas menurut Dunn, suatu kebijakan dikatakan efektif apabila alternatif yang dipilih mencapai hasil yang diharapkan. Penurunan angka stunting membuktikan bahwa intervensi gizi spesifik telah memberikan efek langsung terhadap capaian program. Meskipun demikian, efektivitas belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan rendahnya kesadaran dan konsistensi partisipasi sebagian orang tua balita dalam mengikuti kegiatan posyandu secara rutin, yang menunjukkan bahwa hambatan lebih banyak bersumber dari penerimaan sosial di tingkat rumah tangga dibandingkan dari sisi penyediaan layanan.

Sebagaimana hasil penelitian dari Mallapiseng et al., (2024) faktor yang menjadi penyebab terjadinya stunting pada balita di desa Lawata yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting baik penyebabnya maupun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting bagi anak-anak mereka, terutama mengenai

makanan bergizi, 2) Pola makan yang tidak teratur serta keengganan balita untuk makan makanan rumahan dan lebih memilih jajan diluar rumah, 3) Kualitas Air bersih yang tidak memadai, dan 4) Jarak kelahiran bayi yang terlalu rapat. Maka dari itu tim pengabdian menyusun langkah-langkah kegiatan yang kemudian dilaksanakan selama 40 hari dalam upaya menurunkan angka balita stunting dan mencegah hadirnya balita stunting di kemudian hari.

2. Efisiensi

Efisiensi program tercermin dari alokasi sumber daya, baik tenaga kesehatan maupun Dana Desa, yang diarahkan langsung pada kegiatan yang terbukti berdampak, seperti pemberian makanan tambahan, kegiatan posyandu, dan suplementasi gizi. Ketersediaan tenaga kesehatan dinilai mencukupi dan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sementara sarana dan prasarana posyandu secara umum sudah cukup memadai meskipun masih terdapat kekurangan alat. Namun demikian, pembagian tugas kader posyandu masih perlu diperkuat mengingat kader pada dasarnya adalah tenaga sukarela dengan kapasitas dan waktu terbatas yang harus merangkap berbagai peran.

Dunn menyatakan bahwa efisiensi berkenaan dengan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Terarahnya Dana Desa pada intervensi prioritas menunjukkan optimalisasi rasio biaya-manfaat pada tataran alokasi anggaran, sedangkan hambatan pada pengelolaan sumber daya manusia pelaksana menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran lebih tercapai dibandingkan efisiensi tata kelola pelaksana di lapangan. Dengan demikian, efisiensi pelaksanaan program dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun perbaikan pada pembagian tugas kader dan kelengkapan sarana posyandu masih perlu menjadi perhatian.

3. Kecukupan

Bantuan yang diberikan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dinilai sudah mampu menjawab kebutuhan dasar gizi jangka pendek bagi balita, sehingga secara kuantitas dinilai cukup oleh pihak Puskesmas maupun kader posyandu. Salah satu masyarakat menyampaikan keluhannya sebagai berikut.

“...bantuan makanan tambahan itu cukup membantu meringankan pengeluaran saya, tapi kadang saya berharap ada variasi lain juga, bukan cuma biskuit atau susu saja...” (Masyarakat, wawancara 2026)

Kecukupan menurut Dunn (adequacy) berkenaan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan yang menimbulkan masalah. Mengingat stunting bersifat multifaktorial dan kumulatif sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan, penyediaan PMT saja belum tentu mengubah status gizi anak apabila tidak diikuti perubahan pola asuh dan pemanfaatan layanan kesehatan secara rutin oleh keluarga. Program yang dirancang relatif seragam dari tahun ke tahun tanpa disertai kajian kebutuhan berkala menunjukkan bahwa kecukupan program masih perlu diperkuat dengan intervensi gizi sensitif seperti edukasi personal, sanitasi, dan air bersih di tingkat rumah tangga.

4. Perataan

Ketersediaan sarana kesehatan seperti poskesdes dan pos kesehatan desa di setiap wilayah kecamatan menjamin pemerataan akses secara struktural. Kepala Desa Lamedai menegaskan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan program menjangkau seluruh masyarakat, seperti pendataan sasaran, pelaksanaan posyandu rutin, serta kunjungan rumah. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian keluarga yang sulit dijangkau akibat kendala jarak dan kesibukan bekerja.

Kriteria perataan (equity) menurut Dunn menyoroti distribusi manfaat antar kelompok masyarakat yang berbeda, bukan sekadar ketersediaan layanan secara formal. Fakta bahwa sarana tersedia merata namun pemanfaatannya masih timpang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemerataan penyediaan dan pemerataan hasil. Evaluasi ke depan perlu menggunakan indikator perataan berbasis capaian individual per keluarga, disertai pendekatan afirmatif bagi keluarga yang secara geografis maupun ekonomi lebih rentan tidak terjangkau.

5. Responsivitas

Masyarakat pada umumnya menunjukkan sikap antusias dan partisipasi aktif dalam kegiatan posyandu maupun forum musyawarah desa, seperti Musyawarah Desa dan Musrenbangdes, yang menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat terkait stunting. Namun demikian, masih terdapat keluhan terkait waktu pelaksanaan yang kurang sesuai serta antrean pelayanan, sebagaimana disampaikan oleh kader posyandu dan masyarakat setempat.

Responsivitas menurut Dunn menuntut suatu kebijakan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok sasaran, bukan sekadar menyediakan layanan. Kesenjangan antara sikap positif masyarakat secara verbal dan kepatuhan perilaku, seperti kehadiran rutin,

menunjukkan bahwa dimensi responsivitas pada tataran pelayanan harian masih memerlukan penguatan mekanisme umpan balik yang lebih cepat dan reaktif dibandingkan forum musyawarah tahunan.

6. Ketepatan

Data Puskesmas Tanggetada pada tabel 1 menunjukkan bahwa Desa Lamedai memiliki persentase stunting tertinggi di Kecamatan Tanggetada. Penetapan Desa Lamedai sebagai lokus prioritas didasarkan pada data prevalensi riil, sehingga menjamin ketepatan sasaran secara teknokratis.

Tabel 1. Data Prevalensi Stunting di Kecamatan Tanggetada Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Balita Diukur	Balita Stunting	Persentase
1	Lamedai	61	17	27,86%
2	Lalonggosua	73	15	20,54%
3	Lamoiko	122	4	3,37%
4	Pewisoa Jaya	59	9	15,25%
5	Tondowolio	55	9	16,36%
Kecamatan Tanggetada		1.087	101	9,29%

Sumber: Data Stunting Puskesmas Tanggetada (2024)

Ketepatan (appropriateness) menurut Dunn berkenaan dengan kelayakan tujuan program itu sendiri, bukan sekadar cara mencapainya. Penetapan lokus berdasarkan data prevalensi menunjukkan tercapainya ketepatan pada level penetapan sasaran. Akan tetapi, desain intervensi program masih didominasi standar teknis kesehatan yang bersifat umum, seperti PMT dan suplementasi gizi, dan belum sepenuhnya diadaptasi dengan konteks sosial budaya spesifik desa, misalnya pola makan lokal dan kepercayaan masyarakat terkait pengasuhan anak.

Secara keseluruhan, berdasarkan keenam indikator evaluasi program menurut William N. Dunn yang telah diuraikan, Program Penanggulangan Stunting di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka secara umum telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan kecenderungan keberhasilan. Hambatan yang muncul secara konsisten bersumber dari sisi penerimaan dan pemanfaatan layanan oleh masyarakat, bukan dari sisi penyediaan program oleh pemerintah desa dan Puskesmas. Pelaksanaan program yang selama ini bertumpu pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebaiknya diperluas dengan program pendukung lain, seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, dan

Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), mengingat pemberian PMT yang hanya dilakukan sekali dalam sebulan belum berdampak signifikan apabila tidak diiringi perubahan perilaku dan pola asuh di tingkat rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam indikator kebijakan William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa Program Penanggulangan Stunting di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka secara umum telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya tenaga dan sarana kesehatan yang memadai, alokasi Dana Desa yang terarah, serta ketepatan penetapan Desa Lamedai sebagai lokus prioritas berdasarkan data prevalensi stunting tertinggi di kecamatan tersebut. Namun demikian, capaian program belum sepenuhnya optimal karena hambatan yang muncul secara konsisten bersumber dari rendahnya kesadaran dan konsistensi partisipasi sebagian orang tua balita dalam kegiatan posyandu, bukan dari sisi penyediaan program oleh pemerintah desa dan Puskesmas. Evaluasi ini juga menemukan bahwa penanggulangan stunting semestinya tidak hanya berfokus pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT), tetapi juga meliputi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, dan Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

Bagi Pemerintah Desa Lamedai, kader posyandu, dan Puskesmas Tanggetada disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi gizi kepada orang tua balita agar kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan posyandu semakin meningkat, serta mempertimbangkan inovasi intervensi gizi di luar PMT guna menjaga keberlanjutan keberhasilan program. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan kuantitatif, guna memperkaya hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah.

Referensi

- Arafat. (2026). Studi implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
- Arafat. (2023). Kebijakan Publik: Teori dan Praktik. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grub.
- Arifin, K. M. Z. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Pencegahan Stunting Di Wilayah Pamanukan (Studi Kasus Pada Puskesmas Pamanukan). *The World of Public Administration Journal*.
<https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i1.1344>

- Harahap, K., Nurhayati, Arafat, & Itgo, H. (2024). Metode Penelitian. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Kemenkes RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2021. <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2021>
- Mallapiseng, A., Faturrahman, F., Yana, F., Kure, A., Allo, A. R., Risaldi, D., ... & Riadi, M. R. (2024). Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4801-4807.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Peran dan Tanggung Jawab Kelurahan dan Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi, BPK RI (2021).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Pettalongi, S. S., Muas, M., Arafat, A., & Ndaomanu, D. N. (2025). Metode Campuran dalam Penelitian (Menggabungkan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif). Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, M. P. (2020). Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.